

# POLICY BRIEF

## Penguatan Manajemen ASI Perah dan Pelayanan Laktasi di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu

### Ringkasan Eksekutif

Penguatan manajemen laktasi dan pemanfaatan air susu ibu (ASI) perah, termasuk donor human milk, merupakan intervensi berbasis bukti yang berdampak signifikan terhadap peningkatan luaran kesehatan neonatal serta efisiensi sistem pelayanan kesehatan. Berbagai meta-analisis dan systematic review menunjukkan bahwa pemberian ASI manusia, baik dari ibu sendiri maupun donor, secara konsisten menurunkan risiko necrotizing enterocolitis (NEC), sepsis, serta mortalitas pada bayi prematur dan bayi berat lahir rendah dibandingkan dengan pemberian susu formula (Quigley et al., 2019; Fang et al., 2021). Berdasarkan temuan tersebut, policy brief ini merekomendasikan penguatan tata kelola manajemen laktasi sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.

### Latar Belakang

ASI merupakan standar emas nutrisi bagi bayi, terutama bagi bayi prematur dan bayi dengan kondisi medis khusus. World Health Organization (WHO) dan UNICEF menegaskan bahwa pemberian ASI secara optimal berkontribusi pada penurunan angka kesakitan dan kematian bayi, serta mendukung pencapaian target kesehatan ibu dan anak secara global (WHO & UNICEF, 2023). Namun, dalam praktik pelayanan rumah sakit, tidak semua ibu dapat menyusui secara langsung karena keterbatasan kondisi medis ibu maupun bayi.

Di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu, pelayanan laktasi dan manajemen ASI perah telah tersedia, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia terlatih, belum optimalnya sistem pendukung laktasi, serta belum terintegrasinya manajemen ASI perah dalam tata kelola pelayanan perinatologi secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi menghambat pemanfaatan ASI secara optimal, khususnya pada bayi yang dirawat di ruang intensif neonatal. Secara nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang mendukung pemberian ASI, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan memerlukan penguatan sistem, sumber daya, dan komitmen manajerial agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

## Temuan Kunci dari Laporan Manajemen Laktasi

Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa pemanfaatan ASI manusia, termasuk ASI donor, memiliki dampak klinis yang signifikan terhadap kesehatan bayi. Meta-analisis oleh Fang et al. (2021) menunjukkan bahwa bayi prematur yang menerima donor human milk memiliki risiko NEC yang lebih rendah dibandingkan bayi yang diberi susu formula. Temuan ini diperkuat oleh Cochrane Review yang menyatakan bahwa donor ASI lebih aman dibandingkan formula pada bayi prematur dan bayi berat lahir rendah (Quigley et al., 2019).

Selain manfaat klinis, systematic review juga menunjukkan bahwa dukungan laktasi yang terstruktur meliputi konseling, edukasi, dan dukungan emosional berkorelasi positif dengan keberhasilan menyusui dan keberlanjutan pemberian ASI (Sinha et al., 2015; McFadden et al., 2017). Bukti terkini dari Kashyap dan Choudhari (2024) menegaskan bahwa donor human milk tidak hanya memberikan manfaat kesehatan jangka pendek, tetapi juga berpotensi mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal.

Dari perspektif sistem kesehatan, WHO (2023) menekankan bahwa penguatan layanan laktasi dan manajemen ASI perah di rumah sakit merupakan strategi cost-effective dalam menurunkan beban pembiayaan akibat komplikasi neonatal.

## Opsi Kebijakan

Beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam penguatan manajemen laktasi di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor anatar lain:

- Penguatan kapasitas sumber daya manusia, melalui perhatian konselor laktasi dan tenaga kesehatan perinatology berbasis standar WHO dan Kementerian Kesehatan.
- Integrasi manajemen ASI kedalam tata Kelola pelayanan perinatology termasuk prosedur penyimpanan, distribusi, dan pemantauan kualitas ASI.
- Penguatan dukungan manajerial dan regulasi internal rumah sakit, guna memastikan keberlanjutan layanan layanan laktasi sebagai bagian dari mutu pelayanan.



## A. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis bukti dan konteks lokal, policy brief ini merekomendasikan:

1. Menetapkan penguatan manajemen laktasi sebagai prioritas strategis dalam peningkatan mutu pelayanan ibu dan bayi.
2. Mengembangkan sistem pelayanan laktasi terintegrasi yang mendukung pemanfaatan ASI perah dan donor human milk secara aman dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kolaborasi antara manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam implementasi kebijakan laktasi

### “Rekomendasi Kebijakan”

Implementasi penguatan manajemen laktasi di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan perinatologi, menurunkan risiko komplikasi neonatal, serta mendukung efisiensi pembiayaan kesehatan. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi pada pencapaian target nasional dan global dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak.

### “Penutup”

Penguatan manajemen ASI perah dan pelayanan laktasi merupakan investasi strategis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Dukungan kebijakan internal, komitmen manajemen rumah sakit, serta sinergi dengan kebijakan nasional dan global menjadi kunci keberhasilan implementasi yang berkelanjutan (WHO, 2025; Kemenkes RI, 2024)



## "Daftar Pusaka"



Penulis  
sri Annisapada jamaru



Pembimbing Instans  
Cesa Septiana Pratiwi, M.Mid., PhD



Pembimbing Lahan  
Dini Irma Irliani, SKM., M.Kes